RENJA PERUBAHAN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NUNUKAN



0811-5428-883 dpmptspkabnunukan komplek kantor bupati, Jl Sei Jepun-Mansapa

KATA PENGANTAR

Penyusunan Perubahan Renja ini merupakan tindak lanjut atas dinamika pembangunan dan hasil evaluasi capaian kinerja pada triwulan berjalan. Dokumen ini disusun dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, serta diselaraskan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Nunukan dalam upaya meningkatkan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha di wilayah perbatasan, Sejalan dengan komitmen yang telah dibangun sejak operasionalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP Kabupaten Nunukan terus berupaya menciptakan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang Cepat, Mudah, Transparan, dan Akuntabel. Perubahan Renja ini diharapkan dapat menjadi instrumen bagi seluruh aparatur di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Nunukan dalam mencapai sasaran strategis, khususnya dalam mendorong pertumbuhan investasi yang inklusif bagi masyarakat Nunukan.

Demikian rencana kerja ini dibuat, sebagai bahan masukan dan tindak lanjut dan diharapkan dapat memberikan arahan, tujuan dan sasaran di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan sehingga dapat tercapai hasil yang diharapkan sebagai dasar pemikiran dalam menyusun rencana kerja tahun selanjutnya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Nunukan, 30 Juli 2025
KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN NUNUKAN

JUNI MARDIANSYAH, A.P
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19750601 199412 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 LANDASAN HUKUM 2

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 6

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD S/D TRIWULAN II **1**

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD S/D TRIWULAN II 8

BAB III RKPD PERUBAHAN TAHUN 2025 DPMPTSP **12**

BAB IV PENUTUP **12**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan serta untuk menyesuaikan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Permendari No 86 Tahun 2017 pada Pasal 13 ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

RENJA Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan memuat gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk satu tahun serta menjawab apa yang menjadi tujuan, sasaran, target capaian kinerja serta bagaimana pengorganisasian sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan. Adapun tahapan dalam penyusunan Renja sebagaimana dimaksud dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 pada Pasal 16 ayat (2) disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan;
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

RENJA Perubahan Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nunukan periode tahun anggaran 2025 untuk memberikan dasar dalam merencanakan perubahan program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah, serta menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. RENJA Perubahan Tahun 2025 juga berfungsi sebagai alat untuk mengukur kinerja instansi secara efektif dan berkelanjutan yang merupakan jabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021- 2026.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar yang menjadi acuan dalam perumusan dan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42,

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6618);
14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 61)
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
19. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Promosi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 524);
20. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
21. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
22. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026, Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 65);
25. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2023 Nomor 44);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 Nomor 4)

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan Tahun 2025 untuk memberikan arah kebijakan pembangunan di bidang penanaman modal dan penyelengaraan pelayanan perizinan dan non perizinan selama 1 (satu) tahun berdasarkan hasil evaluasi terhadap target kinerja, yang disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Tujuan penyusunan Rencana Kerja(RENJA) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan tahun 2025;
2. Menjabarkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan kedalam program dan kegiatan disertai lokasi, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif tahun 2025 dan prakiraan tahun 2026;
3. Menetapkan rencana target kinerja dan pagu indikatif program, kegiatan, sub kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan tahun 2025;
4. Menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pengendallian dan evaluasi;
5. Menyediakan instrumen untuk evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah dan laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sub Bab ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENJA Perangkat Daerah, serta penjelasan umum muatan setiap bab, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RENJA Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah serta capaian sasaran Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2025.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijelaskan mengenai uraian rumusan program dan kegiatan berdasarkan visi-misi Kepala Daerah serta prioritas daerah. Bagian ini menyajikan rincian 6 program dan 22 sub-kegiatan

BAB V PENUTUP

Menyajikan kesimpulan rencana kerja, kaidah evaluasi kinerja, dan arahan strategis penanaman modal sebagai instrumen akuntabilitas serta pedoman dalam penyusunan RKA Perubahan Tahun 2025.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 EVALUAS PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap dokumen perencanaan harus dievakuasi dalam pelaksanaannya.

Evaluasi pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan Tahun 2025 sampai dengan akhir bulan Juli dapat disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD
Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	BOBOT (%)	TARGET		REALISASI TARGET		TINGKAT CAPAIAN			SISA ANGGARAN (Rp)
								FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**	Rp 5,616,657,207.00	93.86	100	Persen	39.00	Persen	25.00	Rp 3,025,432,085.00	53.87	Rp 2,591,225,122.00
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Rp 2,277,990.00	0.04	6.00	Dokumen	6.00	Dokumen	130.00	Rp 2,277,990.00	100.00	Rp -
	1 *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Rp 773,520.00	0.01	5.00	Dokumen	4.00	Dokumen	80.00	Rp 773,520.00	100.00	Rp -
	2 *Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	Rp 1,504,470.00	0.03	4.00	Laporan	2.00	Laporan	50.00	Rp 1,504,470.00	100.00	Rp -
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Rp 4,310,137,010.00	72.02	14.00	Bulan	8.00	Bulan	57.14	Rp 2,422,947,908.00	56.22	Rp 1,887,189,102.00
	1 *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	Rp 4,310,137,010.00	72.02	14.00	Bulan	8.00	Bulan	57.14	Rp 2,422,947,908.00	56.22	Rp 1,887,189,102.00
3	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	Rp 1,672,990.00	0.03	1.00	Dokumen	1.00	Dokumen	100.00	Rp 1,672,990.00	100.00	Rp -
	1 *Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang milik Daerah SKPD*	Rp 1,672,990.00	0.03	1.00	Dokumen	1.00	Dokumen	100.00	Rp 1,672,990.00	100.00	Rp -
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Rp -	0.00	1.00	Paket	0.00	Paket	0.00	Rp -	#DIV/0!	Rp -
	1 *Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	Rp -	0.00	1.00	Paket	0.00	Paket	0.00	Rp -	#DIV/0!	Rp -
5	**Administrasi Umum Prangkat Daerah**	Rp 486,069,337.00	8.12	4.00	Laporan	4.00	Laporan	400.00	Rp 261,888,398.00	53.88	Rp 224,180,939.00
	1 *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	Rp 88,767,200.00	1.48	1.00	Paket	1.00	Paket	100.00	Rp 6,641,849.00	7.48	Rp 82,125,351.00
	2 *Penyediaan Bahan Logistik kantor*	Rp 55,425,137.00	0.93	1.00	Paket	1.00	Paket	100.00	Rp 27,269,137.00	49.20	Rp 28,156,000.00
	3 *Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD*	Rp 128,207,000.00	2.14	1.00	Laporan	1.00	Laporan	100.00	Rp 14,452,857.00	11.27	Rp 113,754,143.00
	4 *Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	Rp 213,670,000.00	3.57	1.00	Dokumen	1.00	Dokumen	100.00	Rp 213,524,555.00	99.93	Rp 145,445.00

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	BOBOT (%)	TARGET		REALISASI TARGET		TINGKAT CAPAIAN			SISA ANGGARAN (Rp)
								FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**	**Rp 5,616,657,207.00**	**93.86**	**100**	**Persen**	**39.00**	**Persen**	*25.00*	**Rp 3,025,432,085.00**	**53.87**	**Rp 2,591,225,122.00**
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Rp 712,267,280.00**	**11.90**	**25.00**	**Laporan**	**13.00**	**Laporan**	**200.00**	**Rp 291,430,230.00**	40.92	**Rp 420,837,050.00**
1	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Rp 145,800,000.00*	***2.44***	***12.00***	***Laporan***	***6.00***	***Laporan***	*50.00*	*Rp 27,876,580.00*	*19.12*	*Rp 117,923,420.00*
2	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Rp 547,917,280.00*	***9.16***	***12.00***	***Laporan***	***6.00***	***Laporan***	*50.00*	*Rp 257,254,400.00*	*46.95*	*Rp 290,662,880.00*
3	*Penyeediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Rp 18,550,000.00*	***0.31***	***1.00***	***Laporan***	***1.00***	***Laporan***	*100.00*	*Rp 6,299,250.00*	*33.96*	*Rp 12,250,750.00*
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Rp 104,232,600.00**	**1.74**	**10.00**	**Unit**	**7.00**	**Unit**	**166.67**	**Rp 45,214,569.00**	43.38	**Rp 59,018,031.00**
1	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Rp 67,232,600.00*	***1.12***	***9.00***	***Unit***	***6.00***	***Unit***	*66.67*	*Rp 8,758,300.00*	***13.03***	*Rp 58,474,300.00*
2	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Rp 37,000,000.00*	***0.62***	***1.00***	***Unit***	***1.00***	***Unit***	*100.00*	*Rp 36,456,269.00*	***98.53***	*Rp 543,731.00*
II	***PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL***	***Rp 49,843,670.00***	***0.83***	***100***	***Persen***	***0.00***	***Persen***	*0.00*	***Rp 14,264,960.00***	**28.62**	***Rp 35,578,710.00***
1	**Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Rp 34,191,060.00**	**0.57**	**10.00**	**Dokumen**	**0.00**	**Dokumen**	**0.00**	**Rp 13,211,050.00**	**38.64**	**Rp 20,980,010.00**
1	*Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota*	*Rp 34,191,060.00*	***0.57***	***10.00***	***Dokumen***	***0.00***	***Dokumen***	*0.00*	*Rp 13,211,050.00*	*38.64*	*Rp 20,980,010.00*
2	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Rp 15,652,610.00**	**0.26**	**2.00**	**Dokumen**	**0.00**	**Dokumen**	**0.00**	**Rp 1,053,910.00**	6.73	**Rp 14,598,700.00**
1	*Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)*	*Rp 15,652,610.00*	***0.26***	***2.00***	***Daerah***	***0.00***	***Daerah***	*0.00*	*Rp 1,053,910.00*	*6.73*	*Rp 14,598,700.00*
III	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Rp 32,382,820.00**	**0.54**	**100**	**Persen**	**0.00**	**Persen**	*0.00*	**Rp -**	0.00	**Rp 32,382,820.00**
1	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Rp 32,382,820.00**	**0.54**	**1.00**	**Kegiatan**	**0.00**	**Kegiatan**	**0.00**	**Rp -**	0.00	**Rp 32,382,820.00**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	BOBOT (%)	TARGET		REALISASI TARGET		TINGKAT CAPAIAN			SISA ANGGARAN (Rp)
								FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**	**Rp 5,616,657,207.00**	**93.86**	**100**	**Persen**	**39.00**	**Persen**	*25.00*	**Rp 3,025,432,085.00**	**53.87**	**Rp 2,591,225,122.00**
	1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	*Rp 32,382,820.00*	***0.54***	***1.00***	***Dokumen***	***0.00***	***Dokumen***	*0.00*	*Rp -*	*0.00*	*Rp 32,382,820.00*
IV	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Rp 148,607,130.00**	**2.48**	**100**	**Nilai Baik**		**Nilai Baik**		**Rp 13,435,805.00**	9.04	**Rp 97,167,972.00**
1	**Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp 148,607,130.00**	**2.48**	**435.00**	**Pelaku usaha**	**281.00**	**Pelaku usaha**	**174.84**	**Rp 13,435,805.00**	9.04	**Rp 97,167,972.00**
	1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	*Rp 37,360,260.00*	***0.62***	***200.00***	***Pelaku usaha***	***190.00***	***Pelaku usaha***	*95.00*	*Rp 5,276,290.00*	*14.12*	*Rp 32,083,970.00*
	2 Penyediaan dan Pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko	*Rp 25,479,080.00*	***0.43***	***50.00***	***Pelaku usaha***	***21.00***	***Pelaku usaha***	*42.00*	*Rp 8,159,515.00*	*98.00*	*Rp 17,319,565.00*
	3 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	*Rp 85,767,790.00*	***1.43***	***185.00***	***Kegiatan Usaha***	***70.00***	***Kegiatan Usaha***	*37.84*	*Rp 38,003,353.00*	*44.31*	*Rp 47,764,437.00*
V	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Rp 25,253,830.00**	**0.42**	**100**	**Persen**	**2.00**	**Persen**	*2.00*	**Rp 9,054,159.00**	35.85	**Rp 16,199,671.00**
1	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp 25,253,830.00**	**0.42**	**26.00**	**Dokumen**	**2.00**	**Dokumen**	**7.69**	**Rp 9,054,159.00**	35.85	**Rp 16,199,671.00**
	1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	*Rp 25,253,830.00*	***0.42***	***26.00***	***Dokumen***	***2.00***	***Dokumen***	*7.69*	*Rp 9,054,159.00*	*35.85*	*Rp 16,199,671.00*
VI	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Rp 111,517,540.00	**1.86**	**100**	**Persen**	**0.00**	**Persen**	*0.00*	**Rp -**	0.00	**Rp 111,517,540.00**
1	**Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	Rp 111,517,540.00	**1.86**	**18.00**	**Kegiatan Usaha**	**0.00**	**Kegiatan Usaha**	**0.00**	**Rp -**	0.00	**Rp 111,517,540.00**
	1 Pengawasan Penanaman Modal	*Rp 111,517,540.00*	***1.86***	***18.00***	***Kegiatan Usaha***	***0.00***	***Kegiatan Usaha***	*0.00*	*Rp -*	*0.00*	*Rp 111,517,540.00*
J U M L A H		**Rp 5,984,262,197.00**	**100.00**	**RATA-RATA CAPAIAN FISIK DAN KEUANGAN**					**Rp 3,062,187,009.00**	*51.17*	**Rp 2,922,075,188.00**

BAB III
RENCANA KERJA (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2025 DPMPTSP KABUPATEN NUNUKAN

Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program/kegiatan/sub kegiatan yang dijabarkan ke dalam rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah DPMPTSP Kabupaten Nunukan, yaitu sebagai berikut:

a. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Nunukan, tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Nunukan difokuskan pada penguatan daya saing daerah melalui peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan 6 Program utama yang mencakup Penunjang Urusan Pemerintahan, Pengembangan iklim penanaman modal, Promosi penanaman modal, Pelayanan penanam modal, hingga Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pengelolaan data penanaman modal.

b. Pencapaian Prioritas Daerah Untuk mendukung visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), DPMPTSP Kabupaten Nunukan berperan aktif dalam program prioritas daerah, khususnya pada aspek "Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik" dan "Reformasi Birokrasi". Peran ini diimplementasikan melalui transformasi pelayanan perizinan yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis elektronik guna memberikan kepastian hukum bagi investor di Kabupaten Nunukan.

c. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, DPMPTSP Kabupaten Nunukan telah menetapkan 6 Program dan 22 Sub Kegiatan (termasuk sub kegiatan penunjang dan teknis) dengan total pagu indikatif pada RKPD Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp

7.312.882.770,40. Pendanaan ini dialokasikan untuk memastikan keberhasilan indikator kinerja utama, seperti peningkatan persentase penanam modal dan nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan.

d. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah Dalam upaya mengembangkan potensi sumber daya dan kemampuan ekonomi di wilayah Kabupaten Nunukan, DPMPTSP melakukan identifikasi dan pemetaan keunggulan daerah melalui Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota. Selain itu, dilakukan optimalisasi pendayagunaan potensi ekonomi melalui Program Promosi Penanaman Modal dan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal guna menarik minat investor baik domestik maupun asing untuk mengelola sektor-sektor unggulan di Kabupaten Nunukan

Beberapa rumusan program/kegiatan/sub kegiatan ada yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun pencapaian target kinerja yang didasarkan pada permasalahan dan hambatan yang muncul pada proses pelaksanaan rencana kerja tahun berjala. Berikut disajikan rencana kerja perubahan pada program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan pada tabel 3.1 :

Tabel 3.1

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KAB. NUNUKAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP							**5.968.063.734,00**	**6.389.409.363,00**	**5.984.262.197,00**	**16.198.463,00**							**7.332.092.770,40**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.968.063.734,00**	**6.389.409.363,00**	**5.984.262.197,00**	**16.198.463,00**							**7.332.092.770,40**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**5.968.063.734,00**	**6.389.409.363,00**	**5.984.262.197,00**	**16.198.463,00**							**7.332.092.770,40**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**4.812.581.329,00**	**5.611.533.403,00**	**5.616.657.207,00**	**1.230.858.571,40**							**6.043.439.900,40**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Berkualitas yang disusun*				9 Dokumen	9 Dokumen	52.595.245,00	24.032.410,00	2.277.990,00	-50.317.255,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-			25.234.030,50	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	48.651.635,00	20.088.800,00	773.520,00	-47.878.115,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi				21.093.240,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	3.943.610,00	3.943.610,00	1.504.470,00	-2.439.140,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi				4.140.790,50	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Unit Kerja Internal yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan*				1 Unit	1 Unit	3.474.100.015,00	4.134.115.923,00	4.310.137.010,00	836.036.995,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-			4.340.821.719,15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	32 Orang/bulan	3.474.100.015,00	4.134.115.923,00	4.310.137.010,00	836.036.995,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi				4.340.821.719,15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Unit Kerja Internal yang Mendapatkan Layanan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah*				1 Unit	1 Unit	1.672.990,00	1.672.990,00	1.672.990,00	0,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-			1.756.639,50	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.672.990,00	1.672.990,00	1.672.990,00	0,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi				1.756.639,50	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Unit Kerja Internal yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian*				4 Unit Kerja	4 Unit Kerja	92.050.000,00	1.600.000,00	0,00	-92.050.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-			75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi				0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	92.050.000,00	1.600.000,00	0,00	-92.050.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Unit Kerja Internal yang Mendapatkan Layanan Administrasi Umum*				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	413.851.455,00	649.260.840,00	486.069.337,00	72.217.882,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-		709.408.709,25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	167.723.200,00	186.813.200,00	88.767.200,00	-78.956.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			173.431.860,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	79.732.255,00	85.317.640,00	55.425.137,00	-24.307.118,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			104.960.419,25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	166.396.000,00	163.460.000,00	128.207.000,00	-38.189.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			181.016.430,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	213.670.000,00	213.670.000,00	213.670.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Kerja Internal yang Mendapatkan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang*				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	700.645.104,00	684.397.440,00	712.267.280,00	11.622.176,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-		732.792.312,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	145.800.000,00	145.800.000,00	145.800.000,00	0,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			167.265.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	30.180.000,00	18.550.000,00	18.550.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			31.689.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	554.845.104,00	508.417.440,00	547.917.280,00	-6.927.824,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			533.838.312,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Kerja Internal yang Mendapatkan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	77.666.520,00	116.453.800,00	104.232.600,00	26.566.080,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-		158.426.490,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	77.666.520,00	79.453.800,00	67.232.600,00	-10.433.920,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			83.426.490,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan Jumlah Penanam Modal / Pelaku Usaha**				**30 Persen**	**30 Persen**	**158.556.330,00**	**104.975.780,00**	**49.843.670,00**	**6.057.610,00**							**164.613.940,00**	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Terlaksananya Kajian Pengembangan Investasi*				30 Dokumen	30 Dokumen	108.751.050,00	71.778.500,00	34.191.060,00	-74.559.990,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-		108.755.530,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																		
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				30 Dokumen	10 Dokumen	108.751.050,00	71.778.500,00	34.191.060,00	-74.559.990,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			108.755.530,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten*				2 Dokumen	2 Dokumen	49.805.280,00	33.197.280,00	15.652.610,00	-34.152.670,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-		55.858.410,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)																		
			Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi				2 Daerah	1 Daerah	49.805.280,00	33.197.280,00	15.652.610,00	-34.152.670,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			55.858.410,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Penanam Modal (PMDN dan PMA) Berskala Nasional**				**30 Investor**	**30 Investor**	**217.988.925,00**	**101.912.925,00**	**32.382.820,00**	**6.050.005,00**							**224.038.930,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pameran Investasi dan Potensi Daerah yang Diikuti*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	217.988.925,00	101.912.925,00	32.382.820,00	-185.606.105,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-		224.038.930,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	217.988.925,00	101.912.925,00	32.382.820,00	-185.606.105,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			224.038.930,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha**				**Sangat Baik Indeks**	**Sangat Baik Indeks**	**466.276.010,00**	**387.374.055,00**	**148.607.130,00**	**93.723.990,00**							**560.000.000,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Penerbitan Izin Usaha dan Non Usaha*				200 Jumlah Izin	200 Jumlah Izin	466.276.010,00	387.374.055,00	148.607.130,00	-317.668.880,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-		560.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	196.310.340,00	169.453.705,00	37.360.260,00	-158.950.080,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			280.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	89.819.765,00	48.726.610,00	25.479.080,00	-64.340.685,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				185 Kegiatan Usaha	185 Kegiatan Usaha	180.145.905,00	169.193.740,00	85.767.790,00	-94.378.115,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			190.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Tingkat Kepatuhan Penanam Modal terhadap Ketentuan Perizinan Berusaha**				**Sangat Baik Nilai**	**Sangat Baik Nilai**	**262.661.340,00**	**133.613.400,00**	**111.517.540,00**	**17.338.660,00**							**280.000.000,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal*				14 Agenda	14 Agenda	262.661.340,00	133.613.400,00	111.517.540,00	-151.143.800,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-		280.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				9 Kegiatan Usaha.	9 Kegiatan Usaha.	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				280 Pelaku Usaha	280 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				200 Kegiatan Usaha	18 Kegiatan Usaha	262.661.340,00	133.613.400,00	111.517.540,00	-151.143.800,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			280.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase ketersediaan data dan informasi Penanam Modal/Pelaku Usaha yang dapat diolah, dikaji dan dimanfaatkan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**49.999.800,00**	**49.999.800,00**	**25.253.830,00**	**10.000.200,00**							**60.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengelolaan Data Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi*				65 Dokumen	65 Dokumen	49.999.800,00	49.999.800,00	25.253.830,00	-24.745.970,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				26 Dokumen	26 Dokumen	49.999.800,00	49.999.800,00	25.253.830,00	-24.745.970,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	J U M L A H								**5.968.063.734,00**	**6.389.409.363,00**	**5.984.262.197,00**	**16.198.463,00**							**7.332.092.770,40**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan tahun 2025 merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian tujuan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan Tahun 2025 disampaikan untuk memberikan gambaran tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun kedepan. Untuk itu kaidah kaidah pelaksanaan untuk mewujudkan program, kegiatan dan sub kegiatan ditetapkan sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi hasil terhadap pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2025 dan melaporkan ke Bupati melalui Bappeda Litbang secara periodik sesuai peraturan.
2. RENJA Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan Tahun 2025 menjadi instrumen penilaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah. RENJA Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan Tahun 2025 memuat kegiatan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah khususnya dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Nunukan.

DPMPTSP Kabupaten Nunukan bersama dengan Pemangku Kepentingan berkewajiban melaksanakan program-program dalam RENJA Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan Tahun 2025 ini dengan sebaik baiknya.

Selanjutnya kami mengharapkan agar alokasi dana yang sudah diproyeksikan di dalam rencana kerja sesuai dengan kebutuhan anggaran pada RKPD Perubahan tahun 2025 ini dapat terwujud, sehingga tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam mewujudkan iklim investasi yang kondusif serta pelaksanaan pelayanan perizinan yang prima sebagai berikut:

1. Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Nunukan melalui berbagai media.
2. Menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah.
3. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi, inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian permasalahan pelaksanaan penanaman modal.

Demikian Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan dibuat untuk menjadi pedoman dalam menyusun RKA Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan Tahun 2025.

Nunukan, 30 Juli 2025
KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN NUNUKAN

JUNI MARDIANSYAH, A.P
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19750601 199412 1 001